

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djatmiati, P. M. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, I. 2010. *Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Hafizurrahman, 2004, *Prinsip Kepuasan Pasien*, Jakarta; EGC, hlm. 28.
- HR, R. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Depok; PT. Rajagrafindo Persada.
- Irwansyah, & Yunus. 2022. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Jefkins Franks, 2002, *Public Relations*, Terjemahan oleh Daniel Yadin, 2004, Jakarta; Erlangga, hlm. 14
- Jujun S. Suriasumantri, 2006, *Prosedur Penelitian*, Jakarta; Tarsito.
- Lupiyoadi, Rambat, 2008, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisi 2, Jakarta; Salemba Empat, hlm. 182.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung; CV. Pustaka Setia.
- Mahmud Marzuki, P. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana Prenada Group.
- Muhadjir, N. 2016. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta; Rake Serasin.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muji Kartika Rahayu, 2018, *Sengketa Mazhab Hukum: Sintesis Berbagai Mazhab Dalam Pemikiran Hukum*, Jakarta; Kompas.
- Notoadmojo Soekidjo, 2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta; Rineka Cipta, hlm. 23.
- Nurcholis, H. 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta; Grasindo
- Rahayu, M. K. 2018. *Sengketa Mazhab hukum : Sintesis Berbagai Mazhab Dalam Pemikiran Hukum*. Jakarta; Kompas.

- Rahmadana, M. F., Siagian, A. M., Refelino, M. J., & Tojiri, M. Y. 2020. *pelayanan publik*. Medan; Yayasan Kita Menulis.
- Ratminto dan Winarsih, A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Krina P, Loina Lalolo, 2013, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Jakarta: Bappenas.
- Sidharta, B. A. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung; Mandar Maju.
- Sinambela, L. P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press.
- Suriasumantri, J. S. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta; Tarsito.

PENELITIAN

- Azizah, N. (2020). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Mutiara Timur. *Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh*.
- Handayani, E. (2016). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik Pada Instalansi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kab. Dharmasraya. *Universitas Andalas*.
- Y., Yusnia. (2019). Standar Pelayanan Publik Dalam Pengurusan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.

JURNAL

- Arini Nur Annisa (dkk), 2022, Government Supervision of The Rights Fulfillment of Housed Workers in The Transition Period, Awang Long Law Review, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, STIH Awang Long Samarinda
- Ayu Mulkhadimah, 2022, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Puskesmas Saat Pandemi COVID-19*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 20 Nomor 3, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru.

- Hasyim bariun, Heriwaty, dan Fajriansyah, 2019, *Hubungan Antara Keyakinan Pengobatan dan Kepatuhan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Dalam Perawatan Kesehatan Primer Di Puskesmas Paccerakkang Kota Makassar*, Jurnal FARBAL, Volume 17 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makasar, Makassar.
- Ihsaniyah Febriana Balman, 2015, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tanjungpura Pontianak, Pontianak.
- Musaini, A., Tenri, A., & Ramadhan, S., 2022, *Transparansi Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton*, Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Kab. Buton.
- Rian Ikmal Darmawan, 2013, *Analisa Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, Malang.
- Risnah. (2006). *Transparansi Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Gadjah Mada. Kab. Kuantan, hlm. 19.
- Sri Nur Hari Susanto, 2020, *Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jawa Tengah, Semarang.
- Siregar, N. F., 2018, *Efektivitas Hukum*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume 18 Nomor 2, Sekolah Tinggi Agama Islam barumun Raya, Sumatera Utara.
- Suwarji, Ikka Puspita Sari, 2022, *Implementasi Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Kaji Dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 Di RSUD DR. Soewondo Kendal*, *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, Volume 1 Nomor 2, Universitas Selamat Sri, Kendal.
- Vedrianto, 2016, *Kualitas Pelayanan Puskesmas Kampar Kiri Kec. Kampar Kiri*, Jurnal Online Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Universitas Riau, Riau.
- Wowor, H., Liando, D. M., & Rares, J. (2016). *Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Amurang Timur kab. Minahasa Selatan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan*.

Wanda Mananeke, Joyce J. Rares, Deysi Tampongangoy, 2019, Pengaruh Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Kec. Lembeh Utara Kota Bitung, Jurnal Administrasi Negara, Bitung.

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. [On-line] dikutip : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> pada 1 Desember 2023.

Sehat Negeriku. [On-line] dikutip dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20190830/1631572/soal-pemberian-obat-kadaluarsa-dirjen-engko-tak-ingin-kasus-terulang/> pada 25 Desember 2023.

Detik Jabar. [On-line] diikutip dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212440/purposive-sampling-adalah-berikut-contoh-tujuan-dan-rumusny#:~:text=Purposive%20sampling%20adalah%20metode%20sampling,tentang%20sampel%20yang%20akan%20dipilih> pada 15 Januari 2024

Liputan 6. [On-line] dikutip dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5377886/transparansi-adalah-keadaan-jelas-dan-terbuka-pahami-pengertian-serta-contohnya> pada 17 Januari 2024

CNN Indonesia. [On-line] dikutip dari

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211025165253-12-712111/staf-puskesmas-palsukan-179-vaksinasi-patok-tarif-rp50-ribu> pada 2 Februari 2024.